



**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES
ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024/2025**



TANGGAL : 30 Desember 2024

**JURU BICARA :
I PUTU DODDY, S.Kom., M.M.**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 7 Semarang 50241 – Telp. (024) 8416676; 8415500 Psw. 170

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Bapak Pj. Gubernur Provinsi Jawa Yang Kami Hormati.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa yang kami Hormati.

Yang Kami muliakan segenap Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Segenap rekan-rekan Jurnalis, dan Hadirin yang berbahagia,

Marilah pada kesempatan yang mulia ini, bersama-sama kita panjatkan Syukur kepada Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga masih dipertemukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk menyampaikan Laporan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Pertama tahun Sidang 2024/2025.

Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Sidang Pertama, Tahun 2024/ 2025 didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa

Tengah No. 45 tahun 2022, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

9. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
11. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, tanggal 8 Nopember 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mengunjungi Masyarakat/ konstituen di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah demi menjalankan salah satu fungsi lembaga legislatif yaitu pengawasan dengan memantau kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Wilayah Daerah Pemilihan.
2. Menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung dengan menggelar forum bersama dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait dengan potensi, hambatan maupun kesulitan di daerah-daerah, sehingga tercipta

- keselarasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan roda Pemerintahan.
3. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi serta mensosialisasikan produk-produk kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.
 4. Menyajikan Informasi dan temuan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkembang di Reses dalam Masa Persidangan I Tahun 2024.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Reses dilaksanakan pada tanggal 17 - 24 November 2024, bertempat di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

II. HASIL RESES

Saudara Gubernur, segenap Anggota Dewan yang Terhormat dan Hadirin yang berbahagia

Kegiatan Reses yang telah dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja telah berlangsung dengan lancar, adapun hasil dari kunjungan ke lapangan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat (konstituen) secara umum dapat dilaporkan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024 khususnya di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang telah

berlangsung tanggal 27 Nopember lalu, secara otomatis membuat tensi politik memanas, terutama pada masa Kampanye demi menarik dukungan dari mayoritas masyarakat. Naiknya suhu politik demikian selalu terjadi dan wajar disaat menjelang Pesta Demokrasi karena semua kepentingan politik akan semakin intensif melakukan kerja-kerja politik untuk merebut simpati publik. Walaupun Demikian, secara umum Pelaksanaan Pemilukada, khususnya di Jawa Tengah telah berjalan aman, lancar dan damai sehingga kinerja serta kerjasama dari seluruh elemen patut diapresiasi sehingga dapat menjadi barometer suksesnya Pemilukada dimasa depan.

Kondisi mayoritas masyarakat Jawa Tengah yang hidupnya berada di Pedesaan mestinya mendorong kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat Pedesaaan dengan terobosan melakukan percepatan pembangunan Desa, terutama bidang sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian dan infrastruktur desa hingga menjangkau pada semua Desa yang paling jauh (dalam), sehingga nantinya tidak ada lagi Desa-Desa yang berpredikat miskin ekstrem / tertinggal, baik dalam konteks pembangunan infstruktur, tingkat pendidikan dan taraf kesejahteraan ekonominya.

Demi percepatan Pembangunan di Desa, maka sangat dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan Desa serta sekaligus peningkatan kompetensi (SDM) aparat Desa demi mendukung percepatan dan perbaikan pelayanan masyarakat secara

lebih berkualitas. Hal ini juga mesti didukung dengan perbaikan/ renovasi Kantor-Kantor Pemerintahan Desa dan Kecamatan.

Terkait dengan bidang Pemerintahan, masyarakat mengusulkan agar sosialisasi terhadap Undang-Undang, Peraturan Daerah dan berbagai Peraturan Gubernur, terutama yang terkait dengan hajat hidup sebagian besar masyarakat bisa terus digencarkan lagi agar tidak terjadi miskomunikasi / terputusnya pemahaman antara program pemerintah dan masyarakat.

Sosialisasi yang terus menerus dengan target munculnya pemahaman masyarakat, khususnya yang sangat terkait dengan masalah infrastruktur di Pedesaan, Pertanian, pupuk, bibit, permodalan, Peternakan, berbagai bentuk akses bantuan dan hibah baik terhadap perorangan maupun lembaga/ yayasan. UMKM serta Koperasi mengingat kepentingan ekonomi mayoritas masyarakat Desa sangat berkaitan dengan bidang-bidang ini.

B. Bidang Pertanian dan Perekonomian

Pedesaan adalah menjadi salah satu ciri mayoritas wilayah di Jawa Tengah, dimana mayoritas kehidupan masyarakatnya sangat tergantung pada sektor agraris, khususnya bidang Pertanian dan Perkebunan. Sangat pentingnya sektor ini, maka diperlukan perhatian ekstra, pemihakan dan pemberdayaan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, khususnya pada pemihakan anggarannya.

Upaya meningkatkan kesejahteraan kaum Tani harus dilakukan dari Hulu sampai Hilir yaitu dengan memberikan kemudahan berusaha/ berproduksi di bidang pertanian. Upaya ini mesti diikuti dengan penyediaan bibit/ benih unggul yang cukup, terjangkau dan terjaga kualitasnya serta mudah didapat, menjamin para Petani leluasa mendapatkan Pupuk “bersubsidi” dengan tidak mentolerir terjadinya penimbunan dan kelangkaan.

Kekurangan/ kelangkaan Pupuk bersubsidi yang masih saja terjadi dan dikeluhkan mayoritas para petani, terutama pada musim tanam sehingga secara otomatis menimbulkan lonjakan permintaan (pembelian) harus disudahi.

Karena menjadi kebutuhan mendesak, maka para Petani terpaksa harus membeli Pupuk non subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal, asal barangnya ada. Hal ini terpaksa dilakukan agar produksi pertaniannya tetap berjalan serta bisa diharapkan berhasil dipanen demi meningkatkan kesejahteraan taraf kehidupan keluarganya.

Kemudahan para petani dalam memperoleh pupuk, terutama yang bersubsidi harus menjadi prioritas dan wajib dijamin oleh Pemerintah. Tidak boleh lagi kaum tani merasa dipersulit dan dipermainkan dalam memperoleh haknya, sehingga proses memperoleh pupuk ini wajib dipermudah, baik proses dan kesesuaian dengan kebutuhannya, sehingga dirinya dapat ikut berperan dalam memunculkan Ketahanan Pangan secara nyata.

Kaum Petani juga perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh modal usaha (produksi) serta bantuan alat-alat Pertanian yang dibutuhkan khususnya pada masa tanam dan panen untuk memudahkan dalam menjalankan aktivitasnya sehingga dapat mengurangi biaya produksi secara signifikan.

Disamping itu, penting dijaga stabilitas harga – harga produk pertanian agar tetap “menguntungkan” pada saat musim panen dan sesudahnya, agar tidak mudah dipermainkan oleh para tengkulak.

Kedepan, Pemerintah Provinsi dituntut mampu memunculkan peluang dan pilihan menarik, terutama pada generasi “Milenial” agar tertarik dan terjun di bidang pertanian secara profesional. Para generasi muda hendaknya diberi keyakinan dan bahkan jaminan besar bahwa sektor Pertanian juga dapat menjamin masa depan hidupnya secara layak dan terhormat.

Untuk itu perlu didorong terjadinya modernisasi sektor pertanian yang dikelola secara kreatif, inovatif dan professional sehingga bidang ini menjadi lapangan kerja yang menarik ditekuni generasi muda karena menjanjikan peluang serta kesejahteraan yang terus berkembang sehingga pada saatnya mereka bisa tampil sebagai *entrepreneur/* usahawan di bidang ini.

Pemerintah Daerah dalam hal ini dibutuhkan aksinya, terutama dalam memproteksi dan mengadvokasi bidang Pertanian secara menyeluruh. Tidak boleh lagi terjadi, disaat panen harga-harga produk pertanian, terutama gabah (beras) menjadi jatuh dan sangat

merugikan kaum Tani karena Nihilnya pemihakan Pemerintah dan tidak terkontrolnya ulah para “tengkulak” yang mudah mempermainkan harga, terutama saat panen raya.

Kegiatan usaha/ ekonomi yang juga sangat perlu mendapatkan perhatian serius adalah pemberdayaan sektor UMKM yang sangat menyerap tenaga kerja secara massif dan secara riil turut menggerakakan aktifitas ekonomi masyarakat. Karena itu butuh pemihakan nyata dari Pemerintah Daerah mengingat banyak pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan/ suntikan modal baru, promosi serta pemasaran produk, penataan manajemen dan pengelolaan keuangan sehingga dibutuhkan pendampingan.

Pendampingan, pemihakan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah juga dibutuhkan untuk kegiatan dan produk-produk ekonomi kreatif lokal yang menjadi ciri kas kearifan Daerah (Kabupaten/ Kota) wajib terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah memiliki produk – produk unggulan ekonomi yang menjadi ciri kasnya.

Produk-produk ekonomi kreatif lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM masih terkendala oleh terbatasnya jaringan pemasaran keluar sehingga dibutuhkan kepedulian dan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk membantu dan mendukung secara penuh agar bisa melakukan penetrasi pasar secara lebih luas.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam hal ini dituntut memiliki strategi nyata untuk menyerap dan bahkan memborong

produk ekonomi kreatif di masing-masing daerah seperti dengan menyerap pembeliannya dengan alokasi anggaran APBD demi menyelamatkan dunia industri ekonomi kreatif dan para pelakunya di masing-masing daerah.

Bergeraknya aktivitas ekonomi kreatif yang kini banyak yang melibatkan kaum milenial, kaum Perempuan dan komunitas-komunitas pecinta hoby tertentu yang diharapkan menjadi bentuk usaha baru yang memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan serta dapat membuka banyak lapangan kerja baru jika ditekuni dan mendapatkan pendampingan/ pemihakan serius dari Pemerintah Daerah, terutama terkait pengembangan dan pemasarannya.

Selanjutnya, bermunculnya Desa-Desa Wisata di berbagai Kabupaten/ Kota perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan secara serius, terutama terkait dengan promosinya kepada publik. Potensi Desa Wisata yang bermunculan hendaknya digarap secara serius sehingga menjadi destinasi/ pilihan wisata baru yang memunculkan peluang ekonomi ditengah masyarakat. Pembangunan Desa Wisata harus diikuti dengan rencana pemberdayaan ekonomi masyarakat serta visi pengembangannya.

C. Bidang Pembangunan

Aspirasi publik yang berkembang saat pelaksanaan Reses, khususnya dalam bidang pembangunan secara umum diarahkan/ lebih dikonsentrasikan pada penguatan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada diwilayah

Pedesaan, Pinggiran dan Perbatasan, Jalan penghubung antar Desa, antar Kecamatan dan antar Kabupaten/ Kota.

Dampak cuaca ekstrim yang terjadi cukup lama yang diikuti dengan berbagai bencana terutama Banjir di berbagai wilayah secara nyata telah menyebabkan banyak jalan-jalan yang rusak parah, terutama di jalur Pantura dan Jalur Selatan.

Kondisi demikian telah membuat kecelakaan berlalu lintas meningkat dan membuat mobilitas masyarakat menjadi tidak nyaman karena selalu terjadi kemacetan yang sangat parah, khususnya jalur pantura Semarang - Demak hingga Juwana, Pati-Rembang, serta jalur tengah Demak- Purwodadi-Blora yang masih belum ideal dengan minimnya lampu penerangan jalan serta jalan-jalan Provinsi yang rusak di berbagai daerah.

Untuk itu, maka Pemerintah Provinsi didorong untuk bisa menyediakan anggaran infrastruktur yang terus meningkat dan mencukupi untuk memperbaiki Jalan-Jalan Rusak tersebut demi menciptakan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran perjalanan, khususnya disaat penting terjadinya mobilitas massal seperti momen libur Natal & Tahun Baru serta Hari Raya Iedul Fitri (Lebaran).

1. Urgensi Jalan Tol Pantura Timur Jateng

Jika jalan Tol Jawa tengah dari Brebes-Semarang-Solo sudah terkoneksi ke Jawa Timur dan Yogyakarta, maka harus segera diadakan percepatan realisasi jalan Tol ruas Pantura

Timur Jawa Tengah yaitu dari Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang sehingga terkoneksi dengan Jawa Timur demi mengurai kepadatan lalu lintas dan kemacetan di jalur ini yang semakin tidak terkendali dan sangat parah pada saat-saat-saat tertentu, terutama jika terjadi kecelakaan, banjir dan rob yang sering memutus akses total jalan Raya yang sangat vital ini.

Urgensi realisasi Jalan Tol Semarang-Rembang yang terkoneksi dengan Provinsi Jawa Timur adalah sangat penting dan mendesak karena di wilayah ini tingkat mobilitas transportasinya sangat tinggi, tidak pernah berhenti dan terus bertambah padat, sementara ruas jalan dan kapasitasnya tidak pernah bertambah secara signifikan.

Ikhtiar percepatan ini dimaksudkan agar kemacetan lalu lintas di jalur utama Pantura ini tidak semakin parah serta dapat membuka jalur aktivitas masyarakat lebih leluasa dan mobilitas ekonomi di wilayah sekitarnya dapat berkembang dinamis dan pesat.

2. Fokus pembangunan infrastruktur di Pedesaan hendaknya diprioritaskan pada pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan, pavingisasi, betonisasi dan pengerasan jalan, pembuatan saluran/ irigasi, bendungan, bronjong, pembangunan jembatan antar Desa, pembangunan talud dan tanggul sungai, pengerukan sedimentasi sungai serta Pembangunan Sumur-Sumur untuk pengairan sawah, juga

pengadaan Air Bersih, khususnya di Pedesaan secara lebih merata dan berkelanjutan, terutama untuk mengatasi bencana kekeringan di musim kemarau.

Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Pedesaan, menyambung akses antar wilayah, Desa dan Kampung, melancarkan arus pergerakan masyarakat, menghidupkan mobilitas kegiatan ekonomi serta demi mengantisipasi secara dini terjadinya bencana banjir dan Rob, terutama Banjir di daerah dataran rendah serta longsor di wilayah dataran tinggi sehingga usaha mewujudkan keberadaan Desa yang maju, mandiri, aman, nyaman dan sejahtera secara merata dapat diwujudkan secara lebih merata dan berkelanjutan.

3. Pembangunan inprastruktur Pertanian harus dijamin dan diprioritaskan, mengingat mayoritas penduduk Jawa Tengah masih tergantung pada pola kehidupan agraris sebagai sumber ekonomi utama kehidupannya.

Karena itu pembangunan saluran irigasi, pembuatan sumur-sumur pantek, waduk, embung, perbaikan jalan dan jembatan yang mempermudah akses para petani ke sawah/ perkebunan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, pembuatan bendungan-bendungan air mesti terus ditingkatkan pemerataannya hingga merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah.

4. Keberadaan Pasar Tradisional yang sebagian besar berada di Pedesaan-Pedesaan dan menjadi pusat kegiatan pelaku UMKM hingga kini terasa kurang terurus, tidak tertata dengan baik, terkesan kotor/ kumuh dan tidak nyaman untuk tempat bertransaksi ekonomi. Fakta inilah yang membuat masyarakat sering mengeluhkan kondisinya mengingat Pasar Tradisional selama ini menjadi pusat kegiatan UMKM dan pergerakan ekonomi masyarakat bawah yang bersifat lokal.

Untuk itu Pemerintah Daerah diminta lebih serius menata kembali Pasar-Pasar Tradisional agar terlihat bersih, nyaman dan dekat dengan masyarakat sehingga transaksi ekonomi diantara warga masyarakat semakin meningkat sehingga berkorelasi langsung dengan peningkatan derajat kesejahteraan ekonominya.

5. Kemacetan yang terus terjadi di jalur Pantura khususnya jalur Semarang - Demak karena sering terjadinya naiknya air Rob yang berlangsung cukup lama adalah sumber Kemacetan yang sangat parah dan sangat dikeluhkan masyarakat.

Dengan kondisi demikian maka sangat mengganggu aktifitas masyarakat, mengganggu aktifitas ekonomi, menyebabkan kemacetan parah serta merusak lingkungan hidup serta infrastruktur yang ada. Kondisi

demikian hendaknya menjadi perhatian sangat serius dari Pemerintah, karena kondisi seperti terus berlangsung lama dan tidak segera ditemukan solusinya secara permanen.

6. Pembangunan fisik bidang Pendidikan dan Keagamaan sangat diharapkan keberlanjutannya oleh masyarakat, terutama pembangunan tempat-tempat Ibadah (Masjid/ Musholla/ Gereja serta lainnya) serta Sekolah dan/ Madrasah Swasta dibawah Yayasan/ Lembaga, baik yang bersifat formal, maupun non formal seperti PAUD, TK/RA, LPQ, Madin, Ponpes, Sekolah minggu serta lainnya perlu terus ditingkatkan jumlah Anggarannya karena keberadaannya tidak mendapatkan anggaran/ pembiayaan rutin dari Pemerintah dalam setiap tahunnya.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Alokasi Bosda untuk Sekolah Negeri dan Swasta baik dibawah Kementrian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Keagamaan hendaknya terus ditambah dan disinkronkan karena fungsinya sangat vital dan sama-sama melaksanakan tugas konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedepan hendaknya pembagian Bosda harus ditingkatkan serta disamakan sehingga tidak boleh mendiskriminasi antara sekolah-sekolah/ madrasah, karena hanya bernaung di Kementrian yang berbeda.
2. Terkait insentif/ honor terhadap tenaga kependidikan keagamaan (non formal) kedepan, hendaknya terus dipertahankan/ bahkan

ditingkatkan jumlah penerima dan nilai (nominalnya). Kepedulian Pemprov Jawa Tengah yang telah memberikan insentif kepada para Guru TPQ, Madin/ Pesantren dan Sekolah Minggu serta lainnya patut diapresiasi, namun perlu dipikirkan untuk terus meningkatkan jumlah nominalnya mengingat kebutuhan masyarakat yang terus bertambah banyak disetiap tahunnya.

3. Pemberian bantuan secara signifikan dan terus menerus kepada sekolah-sekolah swasta dibawah Yayasan sangat diperlukan sebagai upaya percepatan untuk meningkatkan kualitas agar setara dengan sekolah-sekolah negeri pada khususnya. Hal ini demi meminimalisir agar masyarakat tidak berebut untuk masuk ke Sekolah-Sekolah Negeri karena dianggap lebih mapan, berkualitas dan gratis. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah swasta yang belum mapan, terkesan berbiaya lebih mahal dan hanya menjadi penampungan bagi anak-anak yang tidak diterima masuk di Sekolah Negeri.
4. Program bantuan sosial dan kesehatan kepada keklompok usia lanjut (Lansia) khususnya yang berasal dari golongan tidak mampu dan beasiswa kepada anak Yatim Piatu/ Dzuafa' hendaknya dianggarkan secara berdaya dan didata secara merata. Hal ini sangat penting, mengingat kelompok ini sangat bergantung pada nasib masa depan dan kesejahteraannya dari kepedulian Pemerintah dan masyarakat sekitarnya.

5. Program bantuan Rumah Tangga Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang kurang mampu (Miskin) agar terus ditingkatkan, baik anggarannya maupun jumlah penerima manfaatnya. Program RTLH ini selalu menjadi berita gembira dan sangat dinanti masyarakat bawah. Karena faktor keterbatasan ekonomi sangat banyak masyarakat yang membutuhkan dan menanti program ini bisa lebih merata lagi. Pada kalangan masyarakat di level ini seakan hampir tidak mungkin untuk membangun/ merenovasi rumahnya secara mandiri menjadi sehat, nyaman dan layak huni secara mandiri.
6. Pendataan Masyarakat tidak mampu/ miskin dan yang berkebutuhan khusus (disabilitas) harus terus menerus dilakukan secara akurat demi memastikan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak menjadi salah sasaran. Kemauan untuk memperbaharui pendataan ini harus terus menerus dilakukan Pemerintah sampai dilevel bawah (Kelurahan/ RW/RT) agar pemberian bantuan sosial tidak salah sasaran dan kadang menumpuk pada orang-orang tertentu saja, sementara pihak yang sebenarnya membutuhkan malah tidak memperoleh haknya sehingga menimbulkan kecemburan/ bahkan benturan sosial ditingkat masyarakat bawah.
7. Banyaknya model/ ragam Kesenian yang ada, tumbuh dan berkembang di masing-masing Daerah telah menjadi ciri khas kearifan setiap daerah hendaknya terus dijaga serta difasilitasi

kelestarian dan aktualisasinya. Karena itu sangat dibutuhkan kepedulian dan dukungan Pemerintah Provinsi untuk memberikan bantuan bagi pengembangan aktifitas berkesenian di daerah, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas pertunjukan, promosi dan berbagai even festival kesenian, ujungnya kesenian daerah ini dapat menjadi kebanggaan masyarakat di masing-masing daerah sehingga sekaligus bisa mendatangkan potensi ekonomi yang berkorelasi langsung pada peningkatan kesejahteraan hidup para pelaku kesenian di masing-masing daerah.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Reses sangat diperlukan untuk digelar secara periodik karena kegiatan demikian dapat dijadikan sarana, wadah silaturahmi, forum komunikasi yang sangat ideal, dengan mempertemukan antara anggota Dewan dengan masyarakat (konstituen) secara langsung, khususnya dalam rangka menjaring aspirasi dengan pola diskusi interaktif, diharapkan masyarakat dapat memberikan masukan, ide, kritik, tuntutan dan saran kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka ikut berperan aktif membangun Provinsi Jawa Tengah melalui para Wakilnya di lembaga legislatif.

Dengan kegiatan Reses dapat muncul korelasi dan sinergi antara aspirasi nyata dan murni yang berkembang ditengah masyarakat dengan program-program pembangunan yang ditetapkan Pemerintah

Daerah sehingga lahir sinkronisasi antara kebutuhan riil masyarakat dengan prioritas pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, berbagai aspirasi dan hasil Reses tersebut perlu mendapatkan perhatian serius serta dijadikan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan untuk menyusun program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dimasa datang.

Musim Hujan yang kini mulai dan segera mencapai puncaknya, hendaknya bisa diantisipasi dan dimitigasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara umum. Kondisi demikian diharapkan dapat meningkatkan “kesiapsiagaan” dari semua unsur, agar jika sewaktu-waktu terjadi bencana, khususnya Banjir dan tanah longsor, tidak menimbulkan korban yang fatal, baik jiwa dan harta benda secara signifikan.

Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, khususnya BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota, juga diharapkan bersikap sigap dengan cepat segera memberikan pertolongan serta bantuan secara cepat kepada masyarakat yang terkena/ terdampak bencana, yang biasanya terjadi saat puncak musim penghujan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah masa Persidangan Pertama tahun 2024/2025. Harapan kami, segala aspirasi yang telah dilaporkan dapat ditindaklanjuti dengan menganggarkan dalam APBD atau langsung melakukan peninjauan ke lapangan.

Akhirnya, kami mohon maaf jika dalam penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah, masa Persidangan Pertama Tahun 2024/ 2025 ini terdapat kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. *Terima Kasih.*

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 30 Desember 2024

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Hj. KARTINA SUKAWATI, S.E., M.M., M.H, ARDHIE KURNIAWAN, A.Md